



Tipologi Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat

Alexandra Valencia Maharani^{1*}, Rahmatyas Aditantri²
Universitas Agung Podomoro, Jakarta, Indonesia¹

International Islamic University Malaysia, Gombak, Selangor, Malaysia²

*Corresponding author email: r.aditantri@live.iium.edu.my

ABSTRACT

This study analyzes the slum level in Kapuk Subdistrict, West Jakarta, using indicators from the Ministry of Public Works Regulation No. 14 of 2018. Kapuk faces challenges such as high population density, inadequate infrastructure, and limited access to basic facilities. Data collection methods included field observations, questionnaires, interviews, and literature studies. Slum scores were calculated based on indicators such as building conditions, roads, drinking water, drainage, waste management, and fire protection. The results show that most areas are categorized as mildly slum, with only one area (RW 07) classified as moderately slum. Major issues include narrow roads, poor drainage, and limited access to clean water. This study recommends infrastructure interventions, sanitation improvements, and enhanced social facilities to prevent further slum deterioration. These findings aim to guide priorities for slum settlement management planning.

Keywords: *slum, settlement, typology, indicator*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, menggunakan indikator dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Kelurahan Kapuk menghadapi tantangan berupa kepadatan penduduk, infrastruktur tidak memadai, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, kuisioner, wawancara, dan studi literatur. Skor kekumuhan dihitung berdasarkan indikator seperti kondisi bangunan, jalan, air minum, drainase, pengelolaan limbah, dan proteksi kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar wilayah masuk kategori kumuh ringan, dengan hanya satu wilayah (RW 07) tergolong kumuh sedang. Kendala utama meliputi jalan sempit, drainase buruk, serta keterbatasan fasilitas air bersih. Studi ini merekomendasikan intervensi infrastruktur, perbaikan sanitasi, dan peningkatan fasilitas sosial untuk mencegah peningkatan kekumuhan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar prioritas dalam perencanaan penanganan kawasan kumuh.

Kata kunci: *kekumuhan, permukiman, tipologi, indikator*

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan perkotaan mengundang terjadinya migrasi, namun terbatasnya ketersediaan lahan mengakibatkan munculnya permukiman yang tidak layak huni sehingga hal ini pun memperburuk citra kota (Melissadion Nathaniela R & Fachmy Sugih Pradifta, 2024). Keterbatasan lahan di daerah perkotaan meningkatkan permintaan akan perumahan, yang seringkali tidak dapat dipenuhi secara memadai dan mendorong pembangunan hunian di atas lahan yang tidak berpenghuni (Williams *et al.*, 2020). Hal ini



mengakibatkan perumahan yang tidak layak huni dan berdampak negatif terhadap kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas hidup (Satterthwaite & Mitlin, 2013). Akses terhadap pemenuhan permukiman layak huni masih menjadi tantangan bagi perkotaan hingga saat ini (Florencetina & Aditantri, 2022). Berdasarkan data penilaian permukiman kumuh yang dilakukan oleh UN-HABITAT, secara global sebanyak 32% atau sekitar 924 juta penduduk yang tinggal di perkotaan, mereka tinggal di permukiman kumuh (Bhatti *et al.*, 2021). Permukiman kumuh dikategorikan sebagai kawasan dengan pemenuhan infrastruktur serta lingkungan perumahan yang tidak layak huni, serta di banyak tempat ditunjukkan dengan adanya tantangan sosial ekonomi yang lebih luas (Shaumira & Aulia, 2024). Permasalahan permukiman kumuh menjadi tantangan umum dalam pengembangan perkotaan yang bisa dilihat dari berbagai aspek, seperti kepadatan penduduk, keterbatasan infrastruktur, resiko bencana alam dan juga kesehatan (Acioly, n.d.; Bueno & Sedeh, 2011).

Permukiman kumuh memberikan dampak buruk yang besar terhadap lingkungan dan tata kota, seperti pencemaran, risiko kesehatan, kerusakan ekosistem, kemacetan lalu lintas, penurunan harga properti, serta ketidaksetaraan sosial (Dhabhalabutr, 2023). Permukiman yang layak, tercukupi kebutuhan dalam hal standar ukuran dan kualitas, merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat (Carrington *et al.*, 2009). Dalam 16 tahun terakhir, permukiman kumuh telah banyak tumbuh dan sering ditemui di negara berkembang (UN HABITAT, 2008). Di kota besar termasuk kota metropolitan, adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* permukiman menyebabkan munculnya permukiman-permukiman kumuh baru setiap tahunnya (Elrayies, 2016; UN HABITAT, 2018).

Kota Jakarta masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kelayakan permukiman khususnya mengenai standar minimal tempat tinggal. Selain itu, banyak kawasan permukiman di ibu kota yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi yang memadai. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat ketahanan bangunan. Keempat aspek ini belum memenuhi kriteria rumah layak huni (BPS DKI Jakarta, 2024). Permukiman kumuh ini, akibat kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar, mengakibatkan beberapa dampak ke lingkungan, merusak sumber daya alam yang ada serta memperburuk kondisi wilayah dimana permukiman kumuh tersebut berada (Elrayies, 2016).

Kelurahan Kapuk yang berada di Wilayah Administratif Jakarta Barat menghadapi berbagai permasalahan berkaitan dengan permukiman. Urbanisasi dan migrasi yang cepat dari daerah pedesaan ke kota merupakan pendorong utama terbentuknya daerah kumuh. Para migran sering kali tidak memiliki cukup sumber daya keuangan untuk membeli rumah formal, sehingga mereka memilih untuk tinggal di daerah informal (Karan Jain *et al.*, 2024). Hal ini juga terjadi di Kelurahan Kapuk yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dengan kepadatan tempat tinggal juga relatif padat yang diperoleh dari hasil observasi. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti drainase yang kurang memenuhi standar juga turut menambah ketidaklayakan permukiman yang ada di kelurahan ini.

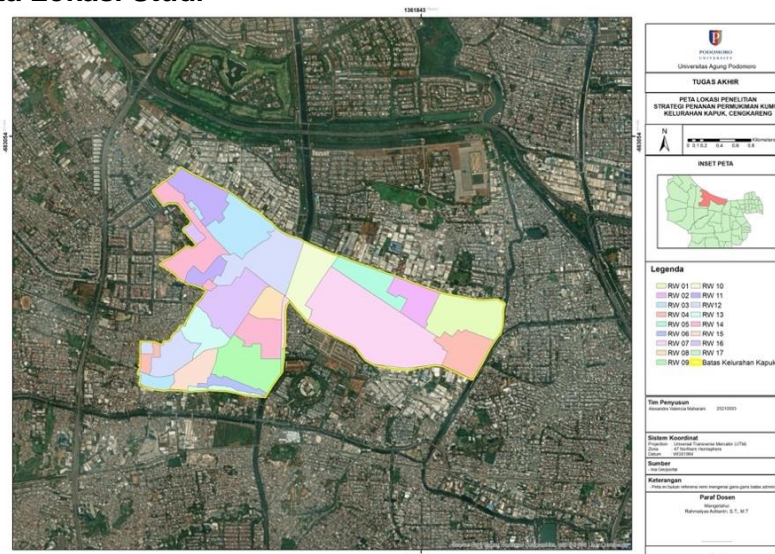
Kepadatan penduduk membuat ruang menjadi terbatas sehingga pemukiman menjadi sempit dan berdekatan yang mengakibatkan kurangnya ruang untuk bangunan, sehingga banyak rumah yang dibangun berdekatan hingga tidak ada jarak antar rumah, sehingga membuat beberapa infrastruktur jalanan juga tidak sesuai standar dengan luas yang hanya bisa di lewati satu motor bergatian dari dua arah yang berbeda. Drainase yang ada di gang-gang tidak mampu untuk menampung air hujan karena ukuran drainase yang tidak memadai. Masyarakat setempat masih membuang sampah ke kali disana, yang mengakibatkan penumpukan sampah yang signifikan, hal ini membuat kekumuhan.

Dengan mempertimbangkan indikator layak huni dan melihat kondisi yang ada, perlu segera dilakukan penanganan agar tidak semakin merugikan masyarakat. Dalam penanganan kawasan kumuh, tidak semua kawasan bisa dibenahi secara bersamaan. Penanganan ini harus melihat kawasan mana yang harus diprioritaskan dan menentukan program yang tepat dalam pelaksanaannya. Mempertimbangkan beberapa latar belakang dan faktor-faktor di atas, penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat kekumuhan permukiman berdasarkan penilaian tingkat kekumuhan dengan menggunakan PerMen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 sehingga menghasilkan tipologi kekumuhan yang diharapkan dapat menjadi gambaran dan masukan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh selanjutnya.

Metode Penelitian

Kelurahan Kapuk terletak di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan berbatasan dengan kelurahan lain seperti Kedaung Kali Angke dan Cengkareng Barat, dengan luas wilayah sekitar 5,13 km². Lokasi studi dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1 berikut.

Gambar 1. Peta Lokasi Studi





Observasi lapangan, studi literatur, kuisisioner dan wawancara dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Observasi Lapangan dilakukan dengan panduan yang sudah tercantum pada lampiran Permen PU No. 14 tahun 2018 untuk mendapatkan data yang akurat dan untuk membanding atau mencocokkan kondisi sebenarnya di lapangan sehingga mendapatkan data untuk pembobotan, seperti: kondisi fisik, sosial, jalanan, drainase lingkungan, penyediaan air, pengelolaan persampah, pengelolaan air limbah yang berada di kawasan kumuh Kelurahan Kapuk, Cengkareng.

Survei kuisisioner dilakukan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden yang berupa masyarakat Kelurahan Kapuk, Cengkareng untuk mengetahui, tentang kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di rumah serta mendapatkan data untuk pembobotan penilaian tingkat kekumuhan. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai secara langsung masyarakat di kawasan penelitian untuk menggali pandangan, pengalaman, dan informasi terkait penanganan permukiman kumuh. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen dan laporan yang ada terkait permukiman kumuh, seperti dokumen PUPR, Bappeda, penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi secara jelas kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di wilayah Kelurahan Kapuk dan juga untuk memahami kebijakan yang efektif untuk penanganan permukiman kumuh di kawasan ini. Data sekunder ini memberikan konteks yang lebih luas dan mendukung pandangan yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan sampel sebagai sumber informasi untuk memahami objek penelitian. Untuk mengukur tingkat kekumuhan permukiman di wilayah studi, dipilih sampel masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kapuk menggunakan metode random sampling. Sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari kepala keluarga (KK) yang tinggal di area permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk.

Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada pada kawasan penelitian sebesar 55.603 kepala keluarga (KK) dengan total jumlah penduduk 172,584 jiwa dan untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model ukuran populasi sampel yang dihitung dengan menggunakan model Slovin. Dari perhitungan tersebut diperoleh setiap Rukun Warga (RW) akan menerima 24 kuesioner.

Tingkat kekumuhan dari permukiman dihitung menggunakan indikator yang spesifik untuk menilai tingkat kekumuhan di kawasan penelitian. Indikator yang umum digunakan meliputi kualitas perumahan, akses ke infrastruktur dasar, kondisi lingkungan dan kesehatan, dengan metode seperti :

- a. Pengukuran Indikator: Mengidentifikasi dan mengukur indikator seperti kondisi perumahan, drainase lingkungan, akses terhadap air bersih, kepadatan penduduk dan ketersediaan fasilitas umum.
- b. Skoring dan Pembobotan: Menetapkan skor untuk setiap indikator dan menentukan bobot setiap indikator berdasarkan relevansi dan dampaknya terhadap situasi kondisi kawasan



Penilaian tingkat kekumuhan, digunakan 7 variabel yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi lingkungan jalan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan kondisi proteksi kebakaran. Penilaian ini akan dibagi berdasarkan RW yang ada di Kelurahan Kembangan Utara yang berjumlah 17 RW luas wilayah sekitar 2,5 km².

Setelah dilakukan perhitungan maka akan didapatkan persentase dari setiap kriteria. Persentase ini akan diberikan pembobotan dengan 76%-100% diberikan bobot 5, 51%-75% diberikan bobot 3, 25%-50% diberikan bobot 1 dan 0%-24% diberikan bobot 0 (Kementerian Pekerjaan Umum, 2018). Hasil pembobotan akan diakumulasikan sehingga didapatkan rata-rata dari semua variabel. Dari hasil rata-rata, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dari tingkat kekumuhan setiap kelas adalah:

- a. Bukan Kawasan Kumuh dengan nilai 0 – 15
- b. Kawasan Kumuh Ringan dengan nilai 16 – 37
- c. Kawasan Kumuh Sedang dengan nilai 38 – 59
- d. Kawasan Kumuh Berat dengan nilai 60 – 80

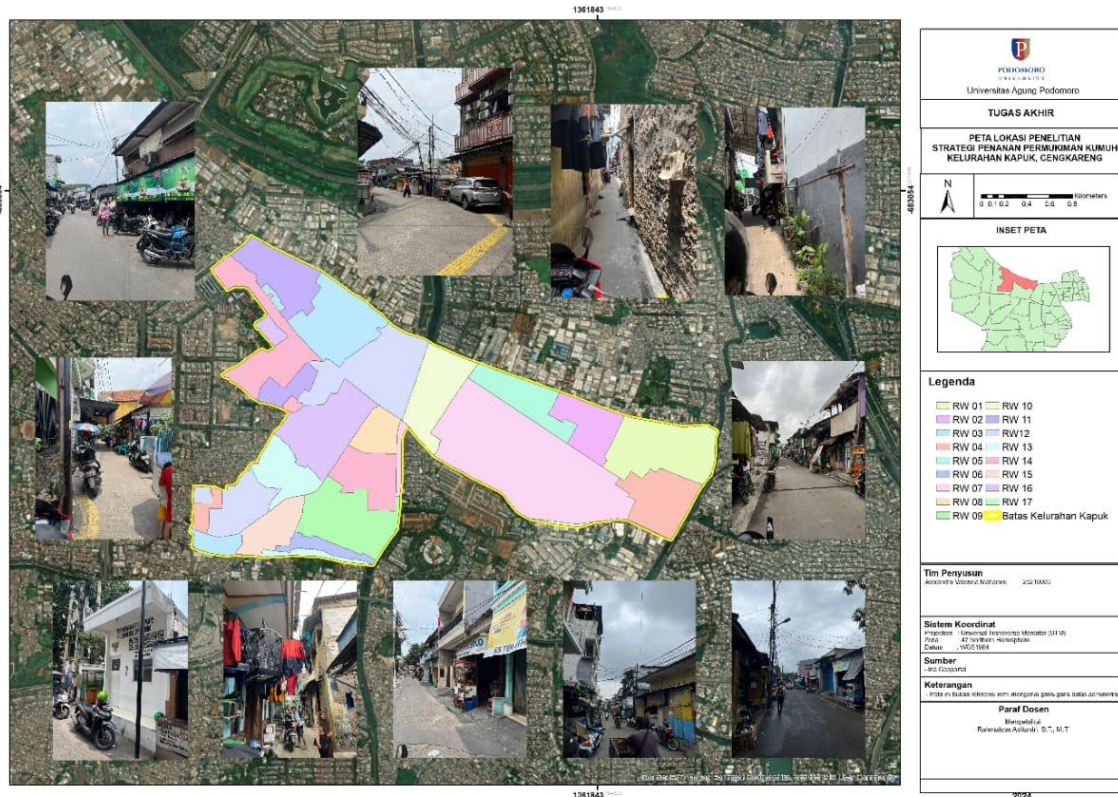
Nilai ini akan menjadi kesimpulan klasifikasi tingkat kekumuhan dari suatu wilayah. Dengan adanya nilai ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan pembenahan dari suatu wilayah. Skor ini juga akan membantu dalam pembuatan program prioritas dalam penanganan permukiman kumuh.

Pembahasan

Gambaran Lokasi Studi

Kelurahan Kapuk terletak di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dan berbatasan dengan kelurahan lain seperti Kedaung Kali Angke dan Cengkareng Barat, dengan luas wilayah sekitar 5,13 km². Menurut data Dukcapil pada tahun 2024, jumlah penduduk Kelurahan Kapuk mencapai 172.584 jiwa. Dengan kondisi ini, Kelurahan Kapuk memiliki kepadatan penduduk sebesar 33.642 jiwa/km². Kelurahan Kapuk memiliki topografi yang relatif datar dengan beberapa daerah dataran rendah, kedekatannya dengan wilayah pesisir dan sungai membuat wilayah ini rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan.

Mayoritas wilayah Kelurahan Kapuk telah menjadi kawasan terbangun, dengan sekitar 99% dari total luas area dimanfaatkan untuk perumahan dan infrastruktur lainnya yang ditunjukkan pada gambar 2. Wilayah ini didominasi oleh kepadatan penduduk yang tinggi. Dari total luas wilayah, sekitar 90% masuk dalam kategori kawasan kumuh, di mana kondisi permukiman menunjukkan kekurangan dalam sanitasi, ruang terbuka hijau, dan infrastruktur dasar.

**Gambar 2. Persebaran Kondisi Permukiman**

Mayoritas penduduk memiliki ekonomi menengah ke bawah dengan sebesar 60% bekerja sebagai buruh, pedagang, dan pekerja informal. Masyarakat di kelurahan ini sangat beragam, dengan mayoritas penduduk asli Betawi dan kelompok etnis lainnya. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan layanan dan infrastruktur.

Faktor-Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Kelurahan Kapuk, Cengkareng

Penilaian tingkat kekumuhan di Kelurahan Kapuk dilakukan menggunakan teknik analisis spasial. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden mengungkapkan beberapa masalah utama terkait permukiman kumuh, seperti keterbatasan akses air bersih, kondisi jalan yang tidak memadai, dan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Selain itu, analisis spasial berhasil mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan.

Kajian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekumuhan di Kelurahan Kapuk, Cengkareng menunjukkan bahwa ada beberapa faktor besar yang turut menyebabkan terjadinya kekumuhan tersebut.



- Ekonomi: Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran menyebabkan banyak penduduk tidak mampu bertahan hidup dan mempunyai kebutuhan dasar seperti perumahan yang memadai (Suhel *et al.*, 2021). Dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk (54% dari total penduduk) bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bulanan berkisar antara Rp2.100.000 hingga Rp2.500.000, yang mendekati Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta.
- Sosial: Rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.
- Lingkungan: Infrastruktur yang buruk dan kurangnya akses terhadap sanitasi berkontribusi terhadap kondisi kehidupan yang buruk. Permasalahan utama seringkali adalah saluran air yang tersumbat dan kurangnya utilitas (Sari & Ridlo, 2021). Di lokasi studi masih banyak ditemukan saluran drainase yang kecil dan tidak sesuai serta kurangnya pembuangan sampah yang layak. Hal ini ditampilkan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Kondisi Permukiman di Kelurahan Kapuk





Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Kapuk

Berdasarkan hasil skoring dari penyebaran kuesioner yang disesuaikan dengan indikator permukiman kumuh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PUPR), diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Kekumuhan Berdasarkan Indikator Permukiman Kumuh Permen PUPR

Indikator	Kriteria	Rata-Rata Skor
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan	3,1
	Tingkat kepadatan bangunan	5,0
	Ketidaksesuaian dengan kriteria teknis bangunan	1,0
Kondisi Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan/permukiman	1,1
	Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	1,2
Kondisi Penyediaan Air	Akses aman air minum tidak tersedia	1,6
	Akses aman air minum tidak tersedia	1,1
Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak tersedia	1,4
	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga terjadi genangan	1,3
	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1,8
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	3,0
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	3,0
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	2,1
	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	1,9
Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	1,1
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	5,0
Total Skor		34,7

Sumber: Analisis, 2024

Dari 7 indikator permukiman yang ditampilkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan bangunan memiliki skor tertinggi yang memiliki arti bahwa kondisi kepadatan bangunan di Kelurahan Kapuk berada pada persentase 76%-100%. Dimana menunjukkan



bahwa kepadatan bangunan tinggi di kawasan ini. Hal ini juga didukung dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk indikator kondisi jalan lingkungan, hanya sekitar 24% jaringan jalan lingkungan yang melayani Kelurahan Kapuk dengan kondisi dan kualitas yang memadai. Indikator kondisi penyediaan air minum dan kondisi drainase lingkungan pun memiliki kondisi yang sama dengan jaringan jalan. Untuk indikator ketersediaan akses aman air minum, mayoritas penduduk menggunakan sumur bor atau pompa yang jarak ke penampungan tinja atau septic tank < 10 meter sehingga air yang digunakan dapat terkontaminasi langsung dengan kotoran dan tidak layak untuk di minum. Adapun drainase di Kelurahan Kapuk secara umum memiliki tinggi genangan rata-rata > 30 cm dengan lama genangan > 2 jam. Frekuensi genangan air terjadi ≤ 2 kali/tahun yang bersumber dari limpasan air hujan atau air buangan rumah tangga.

Untuk aspek pengolahan air limbah, hanya sebagian kecil penduduk yang tidak menggunakan septic tank atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai untuk pembuangan limbah tinja. Idealnya, masyarakat perlu membiasakan perilaku buang air besar yang sehat guna menghentikan rantai kontaminasi limbah manusia yang menjadi sumber penyakit. Selain itu, penting untuk menyediakan dan menjaga fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2014).

Untuk kriteria pengelolaan persampahan, sudah cukup baik karena semua warga sudah terlayani prasarana dan sarana persampahan yang sesuai dengan persyaratan teknis. Meskipun beberapa jalan telah ditangani dengan setapak atau aspal, kondisi jalan yang ada sangat rusak dan terlalu sempit, menyulitkan mobilitas warga. Akses ke gang-gang warga juga terbatas karena penataan bangunan yang tidak teratur, yang menghambat proses penanganan kebakaran oleh petugas pemadam (Memon *et al.*, 2024). Selain itu hampir 90% warga tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sehingga tanggap darurat terhadap kebakaran sangat terbatas. Adapun untuk skor dan kategori kumuh tiap RW disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor dan Kategori Tiap RW

RW	Skor	Kategori Kumuh
1	30	Kumuh Ringan
2	32	Kumuh Ringan
3	32	Kumuh Ringan
4	39	Kumuh Ringan
5	34	Kumuh Ringan
6	32	Kumuh Ringan
7	52	Kumuh Sedang
8	36	Kumuh Ringan
9	34	Kumuh Ringan
10	36	Kumuh Ringan
11	30	Kumuh Ringan
12	28	Kumuh Ringan
13	36	Kumuh Ringan
14	34	Kumuh Ringan
15	36	Kumuh Ringan
16	34	Kumuh Ringan



RW	Skor	Kategori Kumuh
17	35	Kumuh Ringan

Sumber: Analisis, 2024

Skor kumuh tertinggi berada di RW 7 dengan kategori kumuh sedang dibandingkan dengan RW lainnya. Indikator yang dinilai masih sangat dari segi pelayanan ke masyarakat antara lain kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk, masih kurangnya ketersediaan akses aman air minum, pelayanan drainase yang masih kurang serta kurang mampu tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga terjadi genangan, masih kurangnya sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, serta sistem pengelolaan persampahan yang belum memenuhi persyaratan teknis.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penyebaran kuesioner ada sedikit perbedaan saat dibandingkan dengan kondisi ekisting yang terlihat di permukiman di Kelurahan Kapuk menghadapi sejumlah masalah yang berkaitan dengan infrastruktur dan keadaan bangunan. Seperti, banyak rumah penduduk yang dibangun tanpa struktur yang teratur. Adanya kepadatan penduduk juga mengakibatkan rumah yang saling berdempetan sehingga menghalangi akses jalan dan meningkatkan risiko kebakaran besar (Rangkuty *et al.*, 2023). Namun masyarakat tidak menyadari bahwa hal tersebut menjadi masalah.

Menurut wawancara dengan masyarakat setempat masih ada beberapa kawasan yang memiliki air berwarna dan berbau di jam – jam tertentu dan hal itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang ada. Selain itu, kualitas drainase di sebagian besar area RW juga masih menjadi masalah, dengan aliran air yang tidak lancar, mengakibatkan genangan yang bisa bertahan hingga 6 jam atau lebih setelah hujan lebat, ditambah dengan banyak drainase yang tidak tertutup atau tutupnya yang rusak. Semua masalah ini memerlukan perhatian serius agar dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penduduk.

Kesimpulan

Permukiman di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, umumnya tergolong kumuh ringan, kecuali RW 07 yang memiliki tingkat kumuh sedang. Penilaian ini didasarkan pada kepadatan penduduk, kualitas bangunan, infrastruktur, sanitasi, akses air bersih, dan lingkungan hidup. Meskipun terdapat bangunan tua, keterbatasan sanitasi, serta akses yang belum merata terhadap air bersih dan infrastruktur, kondisi ini masih dapat dikelola. Kepadatan penduduk yang tinggi dan terbatasnya ruang terbuka hijau belum menyebabkan kekumuhan berat. Fasilitas sosial seperti kesehatan dan pendidikan tersedia, meski belum optimal.

Diperlukan intervensi pemerintah dan pihak terkait dalam perbaikan infrastruktur, sanitasi, serta fasilitas sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah peningkatan kekumuhan.



Daftar Pustaka

- Acioly, C. (n.d.). *The Informal City and the Phenomenon of Slums: the challenges of slum upgrading and slum prevention The Informal City and the Phenomenon of Slums: the challenges of slum upgrading and slum prevention 1* by. www.unhabitat.org
- Bhatti, L., Talpur, M. A. H., Memon, I. A., Chandio, I. A., & Shaikh, F. A. (2021). The Challenges Faced in the Collection and Disposal of Municipal Solid Waste (MSW) Management: A Case Study of Sanghar City. *Sukkur IBA Journal of Computing and Mathematical Sciences*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.30537/sjcms.v5i1.762>
- BPS DKI Jakarta. (2024). *Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024*.
- Bueno, F. S., & Sedeh, V. (2011, June 29). *Improving Slums: Stories from Sao Paulo*.
- Carrington, L., Pengilley, B., Dauber, S., Fujimoto, Y., McMahon, G., Sutton, B., & Canyon, D. V. (2009). *DESIGNING AND MANAGING SUSTAINABLE SETTLEMENTS WITH APPROPRIATE HOUSING AND INFRASTRUCTURE*. <http://www.unhabitat.org>
- Dhabhalabutr, K. (2023). Housing Development and Informal Settlement Prevention Plan of Bungan City, Thailand. *Journal of Architectural/Planning Research and Studies*, 20(2), 105–122. <https://doi.org/10.56261/jars.v20.248877>
- Elrayies, G. M. (2016). Rethinking Slums: An Approach for Slums Development towards Sustainability. *Journal of Sustainable Development*, 9(6), 225. <https://doi.org/10.5539/jsd.v9n6p225>
- Florencetina, F., & Aditantri, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KAMPUNG DERET BERDASARKAN INDIKATOR KOTAKU. *Vitruvian : Jurnal Arsitektur, Bangunan Dan Lingkungan*, 12(1), 13. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2022.v12i1.002>
- Karan Jain, Ruchi Gaur, & Sunakshi Shokeen. (2024). Interior Design Patterns and Sustainable Housing Solutions: Insights from a Slum Community in North-West Delhi, India. *International Research Journal on Advanced Engineering and Management (IRJAEM)*, 2(04), 747–765. <https://doi.org/10.47392/irjaem.2024.0104>
- Kementerian Kesehatan. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2018). *LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH*.
- Melissadion Nathaniela R, & Fachmy Sugih Pradifta. (2024). Upaya Penanganan Permukiman Kumuh. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v4i1.10368>
- Memon, S. R., Arain, F. J., Kaka, Z. G., Memon, A. W., & Arisa, I. (2024). Identifying The Factors Of Slums Development In Urban Areas Of Qasimabad, Sindh Pakistan. *Sir Syed University Research Journal of Engineering & Technology*, 14(1), 62–68. <https://doi.org/10.33317/ssurj.619>
- Rangkuty, G. I. U., Leonardo, L., Cahyo, S. A., & Suwarlan, S. A. (2023). COASTAL SETTLEMENT SLUM LEVEL ANALYSIS (CASE STUDY: KAMPUNG TUA TIANGWANGKANG). *Journal of Architectural Design and Development*, 4(2), 167–178. <https://doi.org/10.37253/jad.v4i2.8580>
- Sari, A. R., & Ridlo, M. A. (2021). Studi Literature - Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2).
- Satterthwaite, D., & Mitlin, D. (2013). *Reducing Urban Poverty in the Global South* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203104330>



- Shaumira, H., & Aulia, D. N. (2024). Strategies for Enhancing Slum Settlement Study Case: Tegal Sari Mandala III, Medan Denai District. *Jurnal Koridor*, 15(2), 60–71. <https://doi.org/10.32734/koridor.v15i2.17816>
- Suhel, S., Asngari, I., Mardalena, M., Hidayat, A., & Bashir, A. (2021). Identifying factors influencing the low-income community in urban slum settlements in South Sumatera, Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 9–18. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.10385>
- UN HABITAT. (2008). *State of the World's Cities 2010/2011 Bridging The Urban Divide*.
- UN HABITAT. (2018). *WORKING FOR A BETTER URBAN FUTURE: ANNUAL PROGRESS REPORT 2018*.
- Williams, T. K. A., Wei, T., & Zhu, X. (2020). Mapping Urban Slum Settlements Using Very High-Resolution Imagery and Land Boundary Data. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 13, 166–177. <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2019.2954407>